

Analisis Capaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP s.d. Triwulan I Tahun 2022					
Pada Provinsi/Kabupaten/Kota di Bawah BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah					
No	Nama K/L/D	Sub Unsur yang masih rendah	Skor	AOI	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Provinsi Jawa Tengah	Penetapan tujuan		Sasaran strategis Disperindag dan Disnakertrans beserta indikator kinerja dan targetnya tidak tepat. Sasaran strategis/indikator kinerja/target pd Disperindag bukan merupakan penjabaran perencanaan di atasnya, namun mengadopsi atau sama dengan sasaran strategis/indikator kinerja/target pemda. Sasaran strategis/indikator kinerja/ target pd Disnakertrans tidak bersifat makro, namun merupakan sasaran dari masing-masing bidang, sehingga terjadi overlapping dengan program. Selain itu terdapat sasaran/indikator kinerja/target program dan kegiatan pada OPD yang tidak tepat, yaitu pada Disperindag, Disnakertrans, DPMPTSP, Diskop UKM, serta Dinsos.	Gubernur Jawa Tengah agar: 1. Menginstruksikan Kepala Bappeda dan seluruh OPD untuk mengevaluasi kembali dokumen perencanaan meliputi ketepatan sasaran, indikator dan target kerjanya; 2. Menerapkan MR secara berkelanjutan, yaitu : a. Menetapkan kebijakan MR, struktur MR, dan mengintegrasikan proses MR dgn proses perencanaan pemda; b. Meningkatkan kompetensi SDM dlm bidang MR; c. Menginstruksikan Inspektorat Prov Jateng meningkatkan kualitas reviu atas MR.
		Kepemimpinan yg kondusif		Pedoman MR masih dalam bentuk draft dan masih proses penelaahan oleh Biro Hukum;	
				Alokasi sumber daya untuk penerapan MR belum memadai, termasuk peningkatan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko dan mendorong pegawai untuk memiliki kesadaran risiko;	
		Pemantauan		Penerapan MR belum digunakan sebagai indikator penilaian kinerja; Reviu Inspektorat atas proses dan substansi MR OPD belum memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas MR	
2	Kabupaten Banjarnegara	Penetapan tujuan	-	- Sasaran, indikator dan target kinerja pemda belum sepenuhnya spesifik dan berorientasi pada hasil, serta cross cutting sasaran strategis ke sasaran satker yang inliner; - Sasaran, indikator dan target kinerja OPD belum sepenuhnya spesifik dan berorientasi pada hasil serta didukung dengan program kegiatan yang dipilih berdasarkan penentuan skala prioritas yang dapat memberikan daya ungkit maksimal dalam pencapaian sasaran.	Bupati Banjarnegara agar : 1. Memperbaiki kualitas sasaran, indikator dan target kinerja pemda maupun OPD agar lebih spesifik dan berorientasi pada hasil; 2. Memperhatikan cross cutting sasaran strategis pemda ke sasaran OPD agar lebih inline. 3. Pemilihan program dan kegiatan memperhatikan skala prioritas yang dapat memberikan daya ungkit maksimal dalam pencapaian sasaran OPD. 4. Pembangunan struktur dan proses penyelenggaraan SPIP dikaitkan dengan empat tujuan penyelenggaraan SPIP. 5. Memperbaiki Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal dan Capaian kinerja, 6. Menyusun aktivitas pengendalian yang sesuai dengan faktor penyebab permasalahan menyangkut kelemahan SPI penyusunan laporan keuangan dan asset serta temuan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. 7. Segera melengkapi pemenuhan unsur-unsur yang menjadi dasar penilaian MR, meliputi : Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko serta Aktivitas Penyelenggaraan Risiko baik untuk risiko
		Lingkungan pengendalian		- Komitmen terhadap kompetensi dan kebijakan pembinaan SDM belum diidentifikasi, terkait standar kompetensi pendidikan formal, teknis terhadap SDM yang akan ditunjuk/bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran program, pengelola keuangan, pengelola aset serta strategi kebijakan pembinaan SDM yang akan dikembangkan terkait pemenuhan kompetensi dan pengembangannya; - Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait baik dalam lingkup pemda maupun instansi diluar pemda belum diatur secara terstruktur.	
		Penilaian risiko		- Identifikasi dan analisis risiko masih terbatas pada risiko operasional/kegiatan, hasilnya dituangkan ke dalam RR; - Belum seluruh OPD menyusun RR; - Kualitas identifikasi risiko dan RR operasional yang telah dibuat masih belum memadai dan masih diperlukan penyempurnaan;	
		Kegiatan pengendalian		- Belum memiliki standar kebutuhan aset, database terkait standar kelayakan gedung pemerintah; bukti pendukung kepemilikan aset secara lengkap; - Masih dijumpai adanya aset yang belum digunakan secara maksimal; - Proses dan syarat otorisasi transaksi dan kejadian penting belum diatur dan ditetapkan kewenangannya; - Proses, pembatasan akses, pertanggungjawaban untuk transaksi belum seluruhnya dikelola dengan baik.	
		Informasi dan komunikasi		Informasi dan komunikasi terkait MR serta kebijakan pencegahan korupsi belum menghasilkan dampak yang nyata, antara lain belum disusunnya RR sasaran strategis pemda dan sasaran strategis OPD, serta implementasi terhadap pencegahan korupsi belum mempunyai dampak nyata, ditandai adanya indikasi kejadian OTT Bupati Banjarnegara oleh KPK.	

		Pemantauan		Pelaksanaan evaluasi terpisah melalui kegiatan penilaian mandiri maupun penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi belum dilakukan.	Penanganan Risiko baik untuk risiko operasional/kegiatan, risiko sasaran strategis perangkat daerah dan Risiko sasaran strategis pemda. 8. Berkomitmen mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi pada seluruh kegiatan khususnya pada area-area intervensi MCP yang menjadi konsen KPK sesuai regulasi/kebijakan yang telah ditetapkan bupati secara konsekwen dan konsisten.
		Pencapaian tujuan		- Penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB masih dijumpai permasalahan menyangkut unsur-unsur : Kualitas perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal dan Capaian kinerja, - Pemeriksaan LKPD oleh BPK menunjukkan masih dijumpai permasalahan menyangkut kelemahan SPI dalam penyusunan laporan keuangan dan aset serta temuan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.	
3	Kabupaten Banyumas	Lingkungan pengendalian	-	- Perwujudan Peran APIP yang Efektif belum maksimal; - Evaluasi Terpisah belum maksimal, karena proses dan hasil evaluasi belum seluruhnya didokumentasikan; - Penerapan MR belum dilakukan terhadap semua kemitraan yang memiliki peran yang penting dalam organisasi; - UPR belum melakukan pemantauan atas RTP dan keterjadian risiko.	Bupati Banyumas agar: 1. Meningkatkan peran APIP yang lebih efektif, sehingga dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi; 2. Meningkatkan evaluasi terpisah baik dilakukan oleh APIP secara internal, maupun oleh auditor eksternal untuk meningkatkan kinerja sistem pengendalian intern,
		Pencapaian tujuan		- Masih terdapat kondisi barang/aset pada KIB tidak mencerminkan kondisi sebenarnya; - Jumlah temuan kepatuhan dalam laporan hasil audit BPK LKPD tahun 2020 lebih dari lima kejadian (12 temuan).	
4	Kabupaten Batang	Penetapan tujuan		Terdapat indikator Sasaran Strategis Pemda yang ditargetkan kepada OPD yang tidak secara langsung terlibat	Bupati Batang agar: 1. Memerintahkan Kepala Bappelitbangda untuk lebih teliti dalam menyusun dokumen perencanaan periode berikutnya untuk menetapkan OPD pelaksana yang sesuai dengan tupoksi dan indikator yang ditargetkan. 2. Memerintahkan seluruh Kepala OPD untuk menyusun RTP sebelum menyusun RKA sehingga anggaran berbasis risiko dapat terbentuk. Selain itu untuk melakukan monitoring dan
		Kepemimpinan yg kondusif		- Anggaran implementasi MR pd tingkat operasional unit kerja belum memadai; - RTP belum ditindaklanjuti dan belum ada kegiatan monitoring dan reuiu atas RTP yang telah disusun.	
		Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM		- Belum ada program pelatihan/sertifikasi terkait MR, baik di tingkat pemda maupun tingkat OPD; - Belum ada program in house training yang rutin dan terjadwal untuk mengembangkan kompetensi SDM di masing-masing OPD.	
		Hubungan kerja yg baik dgn instansi pemerintah terkait		Belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan yang dapat memitigasi risiko hubungan kerja dengan pihak di luar pemda maupun internal pemda.	
		Penilaian risiko		Kebijakan pengelolaan risiko belum sepenuhnya sesuai dengan Perdep No 4 Thn 2019	
5	Kabupaten Blora	Penetapan tujuan	-	- Target kinerja atas sasaran strategis pemda dan OPD kurang memenuhi prinsip indikator SMART; - Indikator sasaran strategis OPD tdk terkait dgn sasaran strategis pemda; - Target kinerja program dan kegiatan OPD kurang memenuhi prinsip indikator SMART.	Bupati Blora agar: 1. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait kemitraan atau hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait secara memadai; 2. Memerintahkan Kepala Bappelitbangda bersama dgn Kabag Organisasi dlm penetapan penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya agar: a. Melakukan penyalarsan antara sasaran strategis OPD dengan sasaran strategis pemda; b. Melakukan validasi dengan lebih
		Hubungan kerja yg baik dgn instansi pemerintah terkait		Belum sepenuhnya mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait kemitraan atau hubungan kerja dgn instansi pemerintah terkait	
		Reuiu atas kinerja instansi pemerintah		Belum dilakukan reuiu yg memadai untuk menemukan kendala pencapaian kinerja agar dpt dilakukan perbaikan atas capaian kinerja	
		Penetapan dan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja		OPD sampai dgn individu telah memahami prosedur penetapan indikator dan ukuran kinerja terutama unit/pegawai yg menjalankan fungsi perencanaan kinerja, namun belum sepenuhnya tepat dan andal, serta indikator dan ukuran kinerja yg ditetapkan tdk dilaksanakan reuiu dan divalidasi yg memadai scr periodik atas ketepatan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.	
6	Kabupaten Boyolali	Penilaian risiko	-	- Belum ada kebijakan mengenai MR; - MR belum menjadi target dalam RPJMD; - Penerapan MR belum dilakukan terhadap semua kemitraan yang memiliki peran yang penting dalam organisasi; - Kinerja di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup; - Alokasi anggaran untuk penerapan MR kurang memadai; - Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR belum memadai; - UPR belum melakukan pemantauan atas RTP dan keterjadian risiko.	Bupati Boyolali agar : 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait MR; 2. Menginstruksikan kepada seluruh UPR agar menetapkan penerapan MR sbg indikator kinerja pada dokumen perencanaan baik pada tingkatan strategis maupun tingkatan operasional unit kerja; 3. Menginstruksikan kpd UPRisiko agar

		Pencapaian tujuan		- Masih terdapat aset lain2 rusak berat dan tidak ditemukan keberadaannya; - Jumlah temuan kepatuhan dalam laporan hasil audit BPK LKPD tahun 2020 lebih dari lima kejadian (8 temuan).	memaksimalkan penerapan MR thd semua kemitraan yg berkaitan dgn organisasi;
7	Kabupaten Brebes	Penetapan tujuan		Terdapat indikator sasaran strategis pemda yg terlalu mikro, sehingga tidak menggambarkan seluruh kinerja utama dari OPD pelaksanaanya	Bupati Brebes agar: 1. Memerintahkan Kepala Bappelitbangda untuk lebih teliti dalam menyusun dokumen perencanaan periode berikutnya dengan menetapkan indikator yang tepat untuk setiap sasaran strategis. 2. Memerintahkan seluruh Kepala OPD untuk menerapkan MR secara menyeluruh di tingkat strategis dan operasional. 3. Memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menyusun program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko dan Program in house training yang rutin dan terjadwal untuk mengembangkan kompetensi SDM di masing-masing OPD. 4. Menetapkan kebijakan penerapan MR yang meliputi substansi sebagai
		Kepemimpinan yg kondusif	-	- Belum menyusun program/kegiatan yg didukung dgn sumber daya yg memadai untuk penerapan MR - Belum menggunakan RR dr hasil identifikasi dan analisis risiko sbg bahan pertimbangan dlm pengambilan keputusan - Penerapan MR belum dicantumkan sbg indikator kinerja dlm dokumen perencanaan strategis dan operasional - Jajaran pimpinan belum sepenuhnya terlibat dlm proses MR	
		Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM		- Belum ada program pelatihan/sertifikasi terkait MR baik di tingkat pemda maupun tingkat OPD; - Belum ada program in house training yg rutin dan terjadwal untuk mengembangkan kompetensi SDM di masing2 OPD	
		Penilaian risiko		Belum ada pedoman pengelolaan risiko pemda	
		Pemantauan		- Pimpinan belum menjadikan RR dan profil risiko sbg dasar pengambilan keputusan - Pimpinan belum melakukan pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian untuk risiko strategis dan risiko operasional	
8	Kabupaten Demak		-	Proses identifikasi dan analisis risiko belum mencakup setiap tingkatan risiko, yaitu risiko strategis tingkat pemda, risiko strategis tingkat OPD, dan risiko operasional tingkat OPD	Bupati Demak agar: 1. Menginstruksikan penanggungjawab risiko agar melakukan proses identifikasi dan analisis Risiko Strategis tingkat Pemda, Risiko Strategis tingkat OPD dan Risiko Operasional tingkat OPD beserta rencana tindak pengendaliannya, termasuk mitigasi risiko korupsi; 2. Menginstruksikan kepada seluruh
				Penerapan MR belum menjadi indikator kinerja pd dokumen perencanaan UPR tingkatan strategis unit kerja dan tingkatan operasional unit kerja	
				Penerapan MR belum dilakukan thd semua kemitraan yg memiliki peran penting dlm organisasi	
				Analisis dan mitigasi risiko korupsi belum disusun	
				Masih terdapat temuan yg berulang terkait aset tetap, pendapatan dan kekurangan volume pekerjaan pd LHP BPK pd tahun 2016 s.d. 2020	
9	Kabupaten Grobogan	Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya	-	Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya belum sepenuhnya dilakukan sesuai dgn ketentuan dan kebijakan yg berlaku	Bupati Grobogan agar: 1. Memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah bersama dengan Kabag Organisasi, dalam penetapan penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya supaya
		Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja		OPD sampai dengan individu telah memahami prosedur penetapan indikator dan ukuran kinerja terutama unit/pegawai yg menjalankan fungsi perencanaan kinerja, namun belum sepenuhnya tepat dan andal, serta indikator dan ukuran kinerja yg ditetapkan tdk dilaksanakan reviu dan divalidasi yg memadai scr periodik atas ketepatan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja	
10	Kabupaten Jepara	Penetapan tujuan		- Belum merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan pd perencanaan kinerja; - Kinerja program di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup; - Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yg dinilai Kementerian PANRB belum ditindaklanjuti scr optimal.	Bupati Jepara agar: 1. Menginstruksikan Kepala Bappeda untuk melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala OPD supaya segera merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan pada perencanaan kinerja, memperbaiki target kinerja yang kurang berkualitas, dan menindaklanjuti rekomendasi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN-RB sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Surat Menteri PAN-RB Nomor B/461/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021; 2. Mendorong dilaksanakannya proses MR di tingkat strategis pemda, strategis OPD, operasional OPD, mengidentifikasi
		Lingkungan pengendalian		- Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR belum memadai; - belum mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penerapan MR pada semua tingkatan risiko; - Belum mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk kegiatan pembelajaran anti korupsi; - Belum menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan - Belum mendorong penerapan MR sebagai indikator penilaian kinerja; - Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum mampu mendorong pencapaian Kapabilitas APIP Level 3.	
		Penilaian risiko		- Pedoman pengelolaan risiko masih dalam proses kajian dan reviu oleh Bagian Hukum; - Kualitas proses MR belum memadai - Proses MR belum diintegrasikan dengan proses bisnis utama dan proses perencanaan.	

Informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - RR dan RTP belum dikomunikasikan kpd seluruh pihak terkait; - Strategi dan kebijakan MR belum dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait. 	risiko kemitraan dan risiko kecurangan (fraud) dan berpedoman pd Perdep No 4
Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dilaksanakan evaluasi secara berkala atas pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi; - Reviu dan evaluasi atas proses MR belum memadai; - Pemantauan/monitoring terhadap risiko belum dilakukan. 	Thn 2019, dengan upaya, antara lain : a. menggunakan informasi terkait risiko tersebut sebagai dasar penilaian kinerja; b. peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR bagi

		Pencapaian tujuan		- Beberapa capaian kinerja Tahun 2020 tidak tercapai, khususnya capaian kinerja sasaran strategis pemda; - Masih terdapat potensi aset bermasalah hukum;	ketrampilan terkait MR bagi sebagian besar pejabat/pegawai di lingkungan Kabupaten Jepara;
11	Kabupaten Karanganyar	Penetapan tujuan	-	- Sasaran, indikator dan target kinerja pemda belum sepenuhnya spesifik dan berorientasi pada hasil, serta cross cutting sasaran strategis ke sasaran yang inliner; - Sasaran, indikator dan target kinerja OPD belum sepenuhnya spesifik dan berorientasi pada hasil serta didukung dengan program kegiatan yang dipilih berdasarkan penentuan skala prioritas yang dapat memberikan daya ungkit maksimal dalam pencapaian sasaran.	Bupati Karanganyar agar: 1. Memperbaiki kualitas sasaran, indikator dan target kinerja pemda maupun OPD agar lebih spesifik dan berorientasi pada hasil; 2. Memperhatikan cross cutting sasaran strategis pemda ke sasaran OPD agar lebih inline; 3. Pemilihan program dan kegiatan memperhatikan skala prioritas yang dapat memberikan daya ungkit maksimal dlm pencapaian sasaran OPD; 4. Mengaitkan struktur dan proses penyelenggaraan SPIP agar dgn 4 tujuan penyelenggaraan SPIP; 5. Memperbaiki pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja; 6. Menyusun aktivitas pengendalian yang sesuai dengan faktor penyebab permasalahan menyangkut kelemahan SPI penyusunan laporan keuangan dan aset serta temuan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. 7. Menyusun MR, yang didalamnya mengatur tentang : kepemimpinan, kebijakan MR, SDM, kemitraan, proses MR serta aktivitas penanganan risiko baik untuk risiko operasional/kegiatan, risiko sasaran strategis OPD dan Risiko sasaran strategis pemda. 8. Mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi atas area intervensi MCP agar dilengkapi unsur penilaian IEPK menyangkut kebijakan pencegahan korupsi yang mengatur antara lain : Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, Penerapan strategi pencegahan dan Penanganan kejadian korupsi.
		Lingkungan pengendalian		- Komitmen terhadap kompetensi dan kebijakan pembinaan SDM belum diidentifikasi, terkait standar kompetensi pendidikan formal, teknis terhadap SDM yang akan ditunjuk/bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran program, pengelola keuangan, pengelola aset serta strategi kebijakan pembinaan SDM yang akan dikembangkan terkait pemenuhan kompetensi dan pengembangannya; - Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait baik dalam lingkup pemda maupun instansi diluar pemda belum diatur secara terstruktur.	
		Penilaian risiko		- Belum mempunyai kebijakan MR; - Identifikasi dan analisis risiko masih terbatas pada risiko operasional/kegiatan, hasilnya dituangkan ke dalam RR; - Kualitas identifikasi risiko dan RR operasional yang telah dibuat masih belum memadai dan masih diperlukan penyempurnaan; - Risiko strategis OPD dan pemda belum disusun, termasuk didalamnya risiko yang terkait dengan kemitraan dan risiko korupsi.	
		Kegiatan pengendalian		- Belum memiliki standar kebutuhan aset, database terkait standar kelayakan gedung pemerintah; bukti pendukung kepemilikan aset secara lengkap; - Masih dijumpai adanya aset yang belum digunakan secara maksimal; - Proses dan syarat otorisasi transaksi dan kejadian penting belum diatur dan ditetapkan kewenangannya; - Proses, pembatasan akses, pertanggungjawaban untuk transaksi belum seluruhnya dikelola dengan baik.	
		Informasi dan komunikasi		Informasi dan komunikasi terkait MR serta kebijakan pencegahan korupsi belum dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.	
		Pemantauan		Pelaksanaan evaluasi terpisah melalui kegiatan penilaian mandiri maupun penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi belum dilakukan.	
		Pencapaian tujuan		- Penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB masih dijumpai permasalahan menyangkut unsur-unsur : Kualitas perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal dan Capaian kinerja, - Pemeriksaan LKPD oleh BPK menunjukkan masih dijumpai permasalahan menyangkut kelemahan SPI dalam penyusunan laporan keuangan dan aset serta temuan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.	
12	Kabupaten Kendal	Penegakan integritas dan nilai etika	-	- Kebijakan yg ada baru diterapkan scr parsial dan terbatas lingkungnya dan belum memiliki struktur pengelolaan risiko korupsi; - Belum memiliki kebijakan terkait edukasi/pembelajaran terstruktur	Bupati Kendal agar : 1. Menginstruksikan kepada Pimpinan OPD agar melakukan koordinasi dengan Baperlitbang selaku leading sektor bidang perencanaan; 2. Mendukung terselenggaranya SPIP Terintegrasi dgn penganggaran yg memadai yang terintegrasi dlm proses bisnis dan perencanaan; 3. Mengintegrasikan SPIP Terintegrasi dalam proses bisnis dan perencanaan; 4. Membangun budaya risiko dan budaya antikorupsi; 5. Mengalokasikan anggaran untuk penerapan MR pd tingkat unit kerja dan tingkat pemda.
		Kepemimpinan yg kondusif		- Pengalokasikan sumber daya untuk penerapan MR pd tingkat operasional unit kerja belum memadai; - Alokasi anggaran untuk penerapan MR kurang memadai, baik di tingkat unit kerja maupun tingkat pemda; - Kinerja penerapan MR belum digunakan sbg indikator kinerja pd dokumen perencanaan strategis pemda	

		Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM	- Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR belum memadai; - Baru beberapa pegawai yg telah memiliki pemahaman ttg MR	6. Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait MR pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota UPR; 7. Menginstruksikan kpd Sekda agar : a. Menyusun kebijakan pengelolaan risiko agar segera dapat digunakan sebagai pedoman pengelolaan risiko; b. Melakukan identifikasi dan analisis risiko, baik di tingkat strategis pemda, strategis OPD maupun tingkat operasional, mengkomunikasikan strategi dan kebijakan MR, melaksanakan RTP, dan melakukan pemantauan atas implementasi pengendalian yang ditetapkan dan atas tahapan risiko; c. Menyusun perencanaan pembelajaran pengendalian korupsi. 8. Menginstruksikan kpd Inspektur Kabupaten Kendal untuk melakukan reviu atas proses MR; 9. Menginstruksikan kpd Kepala Badan Keuangan Daerah agar menindaklanjuti catatan BPK tentang aset termasuk mengelola aset yang rusak/tidak baik.
		Hubungan kerja yg baik dgn instansi pemerintah terkait	Belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait risiko kemitraan	
		Penilaian risiko	- Belum memiliki kebijakan pengelolaan MR; - Belum melakukan identifikasi dan analisis risiko, baik di tingkat strategis pemda maupun strategis OPD; - Belum seluruh OPD melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko di tingkat operasional OPD	
		Pemantauan berkelanjutan	UPR belum melakukan pemantauan atas RTP dan keterjadian risiko	
		Evaluasi terpisah	APIP belum melakukan reviu thd proses MR	
13	Kabupaten Kudus	Penetapan tujuan	- Masih terdapat kinerja perangkat daerah yg belum sepenuhnya berorientasi pd outcome; - Indikator kinerja yg ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup	Bupati Kudus agar: 1. Sasaran kinerja dan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan telah berorientasi pd hasil serta selaras dgn indikator kinerja utama; 2. Penetapan indikator kinerja secara spesifik, relevan dan terukur; 3. Mempercepat penyelesaian penyusunan kebijakan MR; 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran anti korupsi pada semua level, serta menjangkau stakeholder (penyedia dan pengguna layanan) untuk
		Lingkungan pengendalian	Belum terdapat kegiatan pembelajaran anti korupsi yg terencana, sistematis, dan terstruktur	
		Penilaian risiko	- Belum memiliki kebijakan MR; - UPR tingkat pemda dan tingkat OPD belum ditetapkan; - Kinerja penerapan MR belum digunakan sbg dasar penilaian kinerja pd seluruh unit tingkatan operasional unit kerja; - Kualitas identifikasi risiko dan RR belum memadai; - Belum ada risiko terkait kemitraan dan risiko korupsi.	
		Pemantauan	Reviu thd proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional OPD belum memadai	
14	Kabupaten Pati	Penetapan tujuan	- Beberapa indikator kinerja kegiatan kurang dapat diukur secara obyektif; - Beberapa target kinerja kegiatan kurang baik.	Bupati Pati agar: 1. Memasukkan MRI sbgi indikator kinerja dalam RPJMD; 2. Menyusun Perbup ttg Pedoman Pengelolaan Risiko dan SK Bupati ttg Struktur Pengelola Risiko sesuai Perdep No 4 Thn 2019 dan menambahkan poin dalam draft Pedoman Pengelolaan Risiko bahwa penilaian risiko dilaksanakan selain terhadap proses bisnis, juga dilaksanakan penilaian risiko terkait kemitraan baik internal maupun
		Kepemimpinan yg kondusif	- Alokasi anggaran untuk penerapan MR kurang memadai, belum semua OPD menganggarkan; - MR belum digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan strategis pemda dan belum diukur pencapaiannya.	
		Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM	- Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR belum memadai, yaitu program pelatihan/sertifikasi terkait MR belum ada, baik di tingkat pemda maupun OPD, dan OPD belum memiliki program in house training tahunan; - Jumlah pegawai yang telah memiliki kesadaran atas pemahaman terkait MR belum memadai.	
		Hubungan kerja yg baik dgn instansi pemerintah terkait	Belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan	

		Penilaian risiko	-	- Kebijakan terkait MR belum sesuai dgn Perdep No 4 Thn 2019; - Identifikasi dan analisis risiko baru pada tingkat operasional, sedangkan pada tingkat strategis pemda dan strategis OPD belum dilakukan; - Belum melakukan penilaian risiko korupsi.	eksternal; 3. Mengalokasikan anggaran untuk penerapan MR pd tingkat pemda dan tingkat unit kerja; 4. Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait MR pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota UPR;
		Kegiatan pengendalian	-	Belum adanya pengelolaan, pemeliharaan dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI.	5. Mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan pembelajaran anti korupsi
		Informasi dan komunikasi	-	Pengkomunikasian kebijakan terkait MR belum dilakukan	
		Pemantauan berkelanjutan	-	UPR belum melakukan pemantauan atas RTP dan keterjadian risiko	
		Evaluasi terpisah	-	APIP belum melakukan reviu terhadap proses MR	
		Pencapaian tujuan	-	Aset BUMD yang berfungsi dengan baik baru sebesar 90%	
15	Kabupaten Pekalongan	Penetapan tujuan	-	- Belum merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan dlm dokumen perencanaan; - Beberapa indikator kinerja kegiatan kurang dpt diukur scr obyektif; - Beberapa target kinerja kegiatan kurang baik.	Bupati Pekalongan agar: 1. Memasukkan MRI sebagai indikator kinerja dalam RPJMD; 2. Menyusun Perbup ttg Pedoman Pengelolaan Risiko dan SK Bupati ttg Struktur Pengelola Risiko sesuai Perdep No 4 Thn 2019 dan menambahkan poin dalam draft Pedoman Pengelolaan Risiko bahwa penilaian risiko dilaksanakan selain terhadap proses bisnis, juga terkait kemitraan, baik internal maupun eksternal; 3. Mengalokasikan anggaran untuk penerapan MR pd tingkat pemda dan tingkat unit kerja; 4. Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait MR pd seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota UPR;
		Kepemimpinan yg kondusif	-	- Alokasi anggaran untuk penerapan MR kurang memadai, hanya ada di Inspektorat; - MR belum digunakan sbg indikator kinerja pd dokumen perencanaan strategis pemda dan belum diukur pencapaiannya	5. Mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan pembelajaran anti korupsi secara memadai guna mencapai hasil yang optimal; 6. Menginstruksikan kepada : a. Sekda agar memerintahkan seluruh OPD untuk: 1) Memperbaiki dokumen perencanaan, antara lain terkait dgn perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yg kurang baik sehingga dapat diukur secara obyektif; 2) Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko terhadap proses bisnis dan risiko kemitraan di tingkat strategis pemda, strategis OPD, maupun tingkat
		Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM	-	- Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR belum memadai; - Pegawai yg telah memiliki kesadaran atas pemahaman terkait MR belum memadai.	
		Hubungan kerja yg baik dgn instansi pemerintah terkait	-	Belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait risiko kemitraan	
		Penilaian risiko	-	- Kebijakan terkait MR belum sesuai dgn Perdep No 4 Thn 2019; - Identifikasi dan analisis risiko tingkat strategis pemda dan strategis OPD; - Belum melakukan penilaian risiko korupsi.	
		Kegiatan pengendalian	-	Masih terdapat catatan terkait aset tetap, yaitu pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai, antara lain aset tetap belum dilengkapi dgn bukti kepemilikan.	
		Pemantauan berkelanjutan	-	UPR belum melakukan pemantauan atas RTP dan keterjadian risiko	
		Evaluasi terpisah	-	APIP belum melakukan reviu thd proses MR	
		Pencapaian tujuan	-	Masih terdapat catatan terkait aset tetap, yaitu aset tetap belum dilengkapi bukti kepemilikan, sehingga menimbulkan risiko informasi nilai aset tetap yg kurang akurat dan risiko kehilangan atas aset yg belum tercatat atau belum lengkap identitasnya.	
16	Kabupaten Pematang	Kepemimpinan yg kondusif	-	- Personil pengelola risiko strategis tingkat pemda, pengelola risiko strategis tingkat OPD, dan pengelola risiko operasional tingkat OPD belum ditetapkan; - Tindak pengendalian thd sebagian risiko operasional unit kerja telah diimplementasikan, namun belum berjalan optimal	Bupati Pematang agar : 1. Menetapkan Personil Pengelola Risiko Strategis tingkat Pemda, Pengelola Risiko Strategis tingkat OPD dan Pengelola Risiko Operasional tingkat OPD; 2. Menginstruksikan Kepala OPD agar menyelenggarakan Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi MR; 3. Menginstruksikan penanggungjawab risiko agar melakukan proses identifikasi dan analisis risiko Risiko Strategis
		Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM	-	Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi belum dilakukan untuk setiap tingkatan risiko	
		Penilaian risiko	-	Proses identifikasi dan analisis risiko belum mencakup setiap tingkatan risiko, yaitu risiko strategis tingkat pemda, risiko strategis tingkat OPD, dan risiko operasional tingkat OPD	
		Informasi dan Komunikasi	-	Ketersediaan informasi yg relevan untuk mendukung pengendalian intern tidak lengkap	
		Pencapaian tujuan	-	- Penatausahaan aset belum tertib; - Jumlah temuan ketidakpatuhan dlm LHP BPK berjumlah 9 temuan.	

17	Kabupaten Purbalingga			Belum seluruhnya merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan dlm dokumen perencanaan;	Bupati Purbalingga agar : 1. Menginstruksikan OPD untuk memperbaiki dokumen perencanaan terkait dgn perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan; 2. Mempercepat penyelesaian penyusunan kebijakan MR; 3. Menetapkan Personil Pengelola Risiko Strategis tingkat Pemda, Pengelola Risiko Strategis tingkat OPD dan Pengelola Risiko Operasional tingkat OPD; 4. Menginstruksikan penanggungjawab risiko agar melakukan proses identifikasi dan analisis Risiko Strategis tingkat Pemda.
				Belum memiliki kebijakan terkait MR;	
				Personil Pengelola Risiko tingkat Pemda dan tingkat OPD belum ditetapkan	
				Proses identifikasi dan analisis risiko belum mencakup setiap tingkatan risiko, yaitu risiko strategis tingkat pemda, risiko strategis tingkat OPD, dan risiko operasional tingkat OPD	
		-	-	Penerapan MR belum menjadi indikator kinerja pd dokumen perencanaan UPR tingkatan strategis unit kerja dan tingkatan operasional unit kerja	
		-	-	Penerapan MR belum dilakukan thd semua kemitraan yg memiliki peran penting dlm organisasi	
				Analisis dan mitigasi risiko korupsi belum disusun	
18	Kabupaten Rembang	Penetapan tujuan		- Belum merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan dlm dokumen perencanaan; - Beberapa indikator kinerja kegiatan kurang dpt diukur scr obyektif; - Beberapa target kinerja kegiatan kurang baik; - Terdapat kegiatan yg tdk ada indikator kinerja dan target kinerja.	Bupati Rembang agar: 1. Menyelesaikan proses penyusunan Perbup ttg Pedoman Pengelolaan Risiko dan SK Bupati tentang Struktur Pengelola Risiko agar segera dpt digunakan sebagai pedoman pengelolaan risiko dan menambahkan poin dalam draft Pedoman Pengelolaan Risiko bahwa penilaian risiko dilaksanakan selain terhadap proses bisnis, juga terkait kemitraan, baik internal maupun eksternal; 2. Mengalokasikan anggaran untuk penerapan MR pd tingkat pemda dan tingkat unit kerja; 3. Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait MR pd seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota
		Kepemimpinan yg kondusif		- Alokasi anggaran untuk penerapan MR kurang memadai, hanya ada di Inspektorat; - MR belum digunakan sbg indikator kinerja pd dokumen perencanaan strategis pemda dan belum diukur pencapaiannya	
		Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM		- Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR belum memadai; - Jumlah pegawai yg telah memiliki kesadaran atas pemahaman terkait MR belum memadai	
		Perwujudan peran APIP yg efektif		Kapabilitas APIP Inspektorat masih level 2	
		Hubungan kerja yg baik dgn instansi pemerintah terkait	-	Belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan	
		Pemantauan berkelanjutan		UPR belum melakukan pemantauan atas RTP dan keterjadian risiko	
		Evaluasi terpisah		APIP belum melakukan reviu thd proses MR	
		Pencapaian tujuan		- Terdapat sset dgn kondisi rusak berat dan aset yg tdk ditemukan fisiknya; - Aset masih atas nama pihak lain.	
19	Kabupaten Semarang	Penetapan tujuan		- Kinerja di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan indikator kinerja yg ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup; - Target kinerja di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome); - Belum seluruh OPD merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan.	Bupati Semarang agar : 1. Menginstruksikan kpd Pimpinan OPD agar melakukan koordinasi dengan Barenlitbang selaku leading sektor bidang perencanaan; 2. Mendukung terselenggaranya SPIP Terintegrasi dgn penganggaran yg memadai. 3. Mengintegrasikan SPIP Terintegrasi dlm proses bisnis dan perencanaan; 4. Membangun budaya risiko dan budaya antikorupsi; 5. Mengalokasikan anggaran untuk penerapan MR pd tingkat unit kerja dan tingkat pemda; 6. Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait MR pd seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yg mjd anggota UPR; 7. Menginstruksikan kpd Sekda agar : a. Menyusun kebijakan pengelolaan risiko agar segera dapat digunakan sebagai pedoman pengelolaan risiko; b. Melakukan identifikasi dan analisis risiko, baik di tingkat strategis pemda, strategis OPD maupun tingkat operasional, mengkomunikasikan
		Penegakan integritas dan nilai etika		- Kebijakan yg ada baru diterapkan scr parsial dan terbatas lingkupnya; - Struktur yg dibentuk belum menetapkan pengelolaan risiko korupsi; - Belum memiliki kebijakan terkait edukasi/pembelajaran terstruktur.	
		Kepemimpinan yg kondusif	-	- Alokasi sumber daya untuk penerapan MR pd tingkat operasional unit kerja belum memadai; - Alokasi anggaran untuk penerapan MR kurang memadai, baik di tingkat unit kerja maupun tingkat pemda; - Kinerja penerapan MR belum digunakan sbg indikator kinerja pd dokumen perencanaan strategis pemda.	
		Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM		- Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR belum memadai; - Baru beberapa pegawai yg telah memiliki pemahaman ttg MR.	
		Hubungan kerja yg baik dgn instansi pemerintah terkait		Belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait risiko kemitraan	
		Penilaian risiko		- Belum memiliki kebijakan MR; - Belum melakukan identifikasi dan analisis risiko, baik di tingkat strategis pemda maupun strategis OPD, sehingga proses MR belum terintegrasi dgn proses bisnis dan perencanaan tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja.	
		Pemantauan		- UPR belum melakukan pemantauan atas RTP dan keterjadian risiko; - Belum memiliki pedoman reviu atas MR; APIP belum melakukan reviu thd proses MR	
		Pencapaian tujuan		- Masih terdapat catatan BPK mengenai aset; - Masih terdapat aset dgn kondisi tdk baik.	

20	Kabupaten Sragen	Penetapan tujuan	- Belum merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan; - Kinerja di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan indikator kinerja yg ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup; - Target kinerja di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome).	Bupati Sragen agar: 1. Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait MR pd seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota UPR; 2. Mengintruksikan kpd Sekda agar memerintahhah seluruh OPD untuk: a. Memperbaiki dokumen perencanaan, antara lain terkait dengan perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang kurang baik sehingga dapat diukur secara obyektif; b. Penetapan konteks MR (konteks risiko strategis dan Operasional) serta Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko, baik di tingkat strategis pemda, strategis OPD, maupun tingkat operasional. 3. Menggunakan RR dan profil risiko sbg dasar pengambilan keputusan dan melakukan pemantauan berkelanjutan
		Kepemimpinan yg kondusif	- Alokasi sumber daya untuk penerapan MR pd tingkat operasional unit kerja namun belum memadai; - Belum menggunakan RTP dlm pengambilan keputusan, baik di tingkat operasional maupun strategis; - Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR namun blm memadai.	
		Penilaian risiko	- Belum memperbarui dokumen RTP tiap tahun dan belum memiliki infrastruktur MRI; - Belum menggunakan RTP dlm pengambilan keputusan baik di tingkat operasional maupun strategis.	
		Informasi dan komunikasi	- Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan kpd perwakilan OPD, namun belum dikomunikasikan kpd seluruh pegawai; - RTP strategis pemda, RTP strategis OPD, dan RTP operasional belum dikomunikasikan ke pihak terkait.	
		Pemantauan	- Belum dilaksanakan evaluasi scr berkala atas pengendalian intern; - Reviu dan evaluasi atas proses MR kurang memadai; - Pemantauan/monitoring thd risiko belum dilakukan.	
		Pencapaian tujuan	Masih ada 1 indikator kinerja yg realisasi capaiannya di bawah 90%, yaitu nilai ekspor perdagangan yg capaiannya 38,76%	
21	Kabupaten Sukoharjo	Penetapan tujuan	- Sasaran, indikator dan target kinerja pemda belum sepenuhnya spesifik dan berorientasi pada hasil, serta cross cutting sasaran strategis ke sasaran satker yang inliner; - Sasaran, indikator dan target kinerja OPD belum sepenuhnya spesifik dan berorientasi pada hasil serta didukung dengan program kegiatan yang dipilih berdasarkan penentuan skala prioritas yang dapat memberikan daya ungkit maksimal dalam pencapaian sasaran.	Bupati Sukoharjo agar: 1. Memperbaiki kualitas sasaran, indikator dan target kinerja pemda maupun satuan kerja perangkat daerah agar lebih spesifik dan berorientasi pada hasil; 2. Memperhatikan cross cutting sasaran strategis pemda ke sasaran satker pemda agar lebih inline; 3. Memperhatikan skala prioritas yg dpt memberikan daya ungkit maksimal dlm pencapaian sasaran OPD dlm pemilihan program dan kegiatan; 4. Mengaitkan struktur dan proses penyelenggaraan SPIP dgn 4 tujuan penyelenggaraan SPIP; 5. Memperbaiki pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja; 6. Menyusun aktivitas pengendalian yg sesuai dgn faktor penyebab permasalahan menyangkut kelemahan SPI penyusunan laporan keuangan dan aset serta temuan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. 7. Segera menyusun MR, yang didalamnya mengatur tentang : Kepemimpinan, Kebijakan MR, SDM, Kemitraan, Proses MR serta Aktivitas Penanganan Risiko, baik untuk risiko operasional/kegiatan, risiko sasaran strategis perangkat daerah dan Risiko sasaran strategis pemda. 8. Dalam mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi atas area intervensi MCP agar dilengkapi unsur penilaian IEKP menyangkut
		Lingkungan pengendalian	- Komitmen terhadap kompetensi dan kebijakan pembinaan SDM belum diidentifikasi, terkait standar kompetensi pendidikan formal, teknis terhadap SDM yang akan ditunjuk/bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran program, pengelola keuangan, pengelola aset serta strategi kebijakan pembinaan SDM yang akan dikembangkan terkait pemenuhan kompetensi dan pengembangannya; - Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait baik dalam lingkup pemda maupun instansi diluar pemda belum diatur secara terstruktur.	
		Penilaian risiko	- Belum mempunyai kebijakan MR dan dalam identifikasi dan analisis risiko masih terbatas pada risiko operasional/kegiatan, hasilnya dituangkan ke dalam RR, namun kualitas identifikasi risiko dan RR operasional yang telah dibuat masih belum memadai dan masih diperlukan penyempurnaan. - Belum menyusun risiko strategis OPD dan pemda, termasuk didalamnya risiko yang terkait dengan kemitraan dan risiko korupsi.	
		Kegiatan pengendalian	- Belum memiliki standar kebutuhan aset, database terkait standar kelayakan gedung pemerintah, bukti pendukung kepemilikan aset secara lengkap, masih dijumpai adanya aset yang belum digunakan secara maksimal; - Proses dan syarat otorisasi transaksi dan kejadian penting belum diatur dan ditetapkan kewenangannya; - Proses, pembatasan akses, pertanggungjawaban untuk transaksi belum seluruhnya dikelola dengan baik.	
		Informasi dan komunikasi	Informasi dan komunikasi terkait MR serta kebijakan pencegahan korupsi belum dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.	
		Pemantauan	Pelaksanaan evaluasi terpisah melalui kegiatan penilaian mandiri maupun penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi belum dilakukan.	

		Pencapaian tujuan		- Penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB masih dijumpai permasalahan yangangkut unsur-unsur : Kualitas perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal dan Capaian kinerja, - Pemeriksaan LKPD oleh BPK menunjukkan masih dijumpai permasalahan yangangkut kelemahan SPI dalam penyusunan laporan keuangan dan aset serta temuan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.	unsur penilaian IFRK menyangkut kebijakan pencegahan korupsi yang mengatur antara lain: Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, Penerapan strategi pencegahan dan Penanganan kejadian korupsi.
22	Kabupaten Tegal	Penetapan tujuan		Dokumen perencanaan belum mencantumkan sasaran program dan sasaran kegiatan	Bupati Tegal agar:
		Lingkungan pengendalian		- Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yg mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, SOP, serta standar perilaku antikorupsi belum ditetapkan; - Belum mengalokasikan sumber daya untuk penerapan MR; - Pegawai belum mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait MR; - Pegawai belum memiliki kesadaran terkait MR; - Identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko terkait kemitraan belum dilakukan.	1. Menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan dalam dokumen perencanaan; 2. Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan kebijakan tertulis atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, SOP, dan standar perilaku antikorupsi;
		Penilaian risiko		- Belum memiliki kebijakan MR dan menetapkan struktur pengelola risiko sesuai Perdep 4 Thn 2019; - Identifikasi dan analisis risiko strategis maupun operasional belum dilakukan sesuai Perdep 4 Thn 2019	3. Mengalokasikan sumber daya untuk penerapan MR termasuk untuk kegiatan sosialisasi, internalisasi, serta pelatihan pegawai;
		Kegiatan pengendalian		- Reviu kinerja oleh pimpinan belum dilakukan scr berkala dan terstruktur; - Proses penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja belum didokumentasikan dgn baik.	4. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait kemitraan; 5. Menyusun dan menetapkan Kebijakan MR yang sesuai Perdep 4 Thn 2019, termasuk menetapkan struktur pengelola risiko;
		Informasi dan komunikasi		- Strategi dan kebijakan MR belum dikomunikasikan; - Register risiko dan RTP belum dikomunikasikan ke pihak terkait.	6. Melakukan Identifikasi dan analisis risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional untuk seluruh OPD, serta
		Pemantauan	-	- Belum mengevaluasi scr berkala pengendalian intern yg telah dilakukan dlm rangka mencapai tujuan organisasi; - Proses MR belum direviu; - Pemantauan/monitoring thd risiko belum dilakukan.	Bupati Temanggung agar: 1. Menetapkan kebijakan dan sasaran program dan sasaran kegiatan dalam dokumen perencanaan; 2. Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan kebijakan tertulis atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, SOP, dan standar perilaku antikorupsi; 3. Mengalokasikan sumber daya untuk penerapan MR termasuk untuk kegiatan sosialisasi, internalisasi, serta pelatihan pegawai;
23	Kabupaten Temanggung	Penetapan tujuan	-	- Belum merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan dlm dokumen perencanaan; - Beberapa indikator kinerja kegiatan kurang dpt diukur scr obyektif; - Beberapa target kinerja kegiatan kurang baik; - Terdapat kegiatan yg tdk ada indikator kinerja dan target kinerja.	1. Menetapkan kebijakan dan sasaran program dan sasaran kegiatan dalam dokumen perencanaan; 2. Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan kebijakan tertulis atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, SOP, dan standar perilaku antikorupsi; 3. Mengalokasikan sumber daya untuk penerapan MR termasuk untuk kegiatan sosialisasi, internalisasi, serta pelatihan pegawai;
		Kepemimpinan yg kondusif	-	- Alokasi anggaran untuk penerapan MR kurang memadai, hanya ada di Inspektorat; - MR sdh digunakan sbg indikator kinerja pd dokumen perencanaan strategis pemda, tetapi belum diukur pencapaiannya	4. Melakukan Identifikasi dan analisis risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional untuk seluruh OPD, serta
		Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM		- Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR belum memadai; - Jumlah pegawai yg telah memiliki kesadaran atas pemahaman terkait MR belum memadai	5. Menyusun dan menetapkan Kebijakan MR yang sesuai Perdep 4 Thn 2019, termasuk menetapkan struktur pengelola risiko;
		Hubungan kerja yg baik dgn instansi pemerintah terkait		Belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan	6. Melakukan Identifikasi dan analisis risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional untuk seluruh OPD, serta
		Penilaian risiko		Belum melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko, baik di tingkat strategis pemda, strategis OPD, maupun tingkat operasional.	7. Melakukan Identifikasi dan analisis risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional untuk seluruh OPD, serta
		Kegiatan pengendalian		Sertifikat beberapa aset pemda berupa tanah masih atas nama pihak lain	8. Melakukan Identifikasi dan analisis risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional untuk seluruh OPD, serta
		Pemantauan berkelanjutan		UPR belum melakukan pemantauan atas RTP dan keterjadian risiko	9. Melakukan Identifikasi dan analisis risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional untuk seluruh OPD, serta
		Evaluasi terpisah		APIP belum melakukan reviu thd proses MR	10. Melakukan Identifikasi dan analisis risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional untuk seluruh OPD, serta
		Pencapaian tujuan		- Terdapat aset dgn kondisi rusak berat dan aset yg tdk ditemukan fisiknya, serta terdapat 11 aset pemda yg masih atas nama pihak lain. - Jumlah temuan kepatuhan dlm LHA BPK atas LKPD Thn 2020 lebih dr 5 kejadian.	11. Melakukan Identifikasi dan analisis risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional untuk seluruh OPD, serta
24	Kabupaten Wonogiri	Lingkungan pengendalian		Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi belum dilakukan	Bupati Wonogiri agar :
		Penilaian risiko		Personil Pengelola Risiko tingkat Pemda dan tingkat OPD belum ditetapkan	1. Menetapkan Personil Pengelola Risiko Strategis tingkat Pemda, Pengelola Risiko Strategis tingkat OPD dan Pengelola Risiko Operasional tingkat OPD;
		Penilaian risiko	-	Proses identifikasi dan analisis risiko belum mencakup setiap tingkatan risiko, yaitu risiko strategis tingkat pemda, risiko strategis tingkat OPD, dan risiko operasional tingkat OPD	2. Menginstruksikan Kepala OPD agar
		Penilaian risiko		Analisis dan mitigasi risiko korupsi belum disusun	

		Pencapaian tujuan		Penetapan target thn 2020 tdk memperhatikan realisasi thn sebelumnya, sehingga capaiannya jauh melampaui target yg ditetapkan	2. menginstruksikan kepada OPD agar menyelenggarakan Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi MR; 3. Menginstruksikan penanggungjawab risiko agar melakukan proses identifikasi dan analisis risiko Risiko Strategis tingkat Pemda, Risiko Strategis tingkat Bupati Wonosobo agar :
25	Kabupaten Wonosobo	Penetapan tujuan		- Kinerja di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan indikator kinerja yg ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup; - Target kinerja di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome); - Belum seluruh OPD merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan	Bupati Wonosobo agar : 1. Menginstruksikan kepada Pimpinan OPD agar melakukan koordinasi dgn Bappeda selaku leading sector bidang perencanaan; 2. Menginstruksikan kpd Sekda agar menyusun perencanaan pembelajaran pengendalian korupsi; 3. Mendukung terselenggaranya SPIP Terintegrasi dengan penganggaran yg memadai; 4. Mengintegrasikan SPIP Terintegrasi dalam proses bisnis dan perencanaan; 5. Membangun budaya risiko dan budaya antikorupsi; 6. Mengalokasikan anggaran untuk penerapan MR pd tingkat unit kerja dan tingkat pemda; 7. Menginstruksikan kepada Sekda agar :
		Penegakan integritas dan nilai etika		- Kebijakan terkait pengendalian korupsi baru diterapkan scr parsial dan terbatas lingkupnya; - Struktur yg dibentuk belum menetapkan pengelolaan risiko korupsi; - Belum memiliki kebijakan terkait edukasi/pembelajaran terstruktur.	a. Menyelesaikan proses penyusunan kebijakan pengelolaan risiko sehingga dpt segera digunakan sebagai pedoman pengelolaan risiko; b. melakukan identifikasi dan analisis risiko, baik di tingkat strategis pemda, strategis OPD maupun tingkat operasional, serta mengkomunikasikan strategi dan kebijakan manajemen risiko, melaksanakan RTP, dan melakukan pemantauan atas implementasi pengendalian yang
		Kepemimpinan yg kondusif		- Alokasi sumber daya untuk penerapan MR pd tingkat operasional unit kerja belum memadai; - Alokasi anggaran untuk penerapan MR kurang memadai baik di tingkat unit kerja maupun tingkat pemda; - Kinerja penerapan MR belum digunakan sbg indikator kinerja pd dokumen perencanaan strategis pemda.	Walikota Pekalongan agar: 1. Melakukan pelatihan dan inhouse training peningkatan kompetensi pada setiap tingkatan risiko dengan empertimbangan: a. Strategis Unit untuk Eselon II adalah 50% - 70% pejabat; b. Operasional Unit untuk Eselon III ke atas sampai dengan staf adalah 50% - 70% pejabat dan staff di level ini.
		Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM		- Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR belum memadai; - Baru beberapa pegawai yg telah memiliki pemahaman pengelolaan risiko terkait kemitraan	2. Menyusun kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan yang memiliki peran penting dalam organisasi, dengan
		Hubungan kerja yg baik dgn instansi pemerintah terkait		Belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan	
		Penilaian risiko		- Belum memiliki kebijakan pengelolaan MR; - Belum melakukan identifikasi dan analisis risiko, baik di tingkat strategis pemda maupun strategis OPD, sehingga proses MR belum terintegrasi dgn proses bisnis dan perencanaan tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja.	
		Pemantauan	-	- UPR belum melakukan pemantauan atas RTP dan keterjadian risiko; - Belum memiliki pedoman reviu atas MR; - APIP belum melakukan reviu thd proses MR	
		Pencapaian tujuan		- Masih terdapat catatan BPK mengenai aset; - Masih terdapat aset dgn kondisi tdk baik.	
26	Kota Pekalongan	Lingkungan pengendalian		- Belum ada pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi pd setiap tingkatan risiko; - Belum memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan; - Belum terdapat kegiatan pembelajaran anti korupsi yg terencana, sistematis, dan terstruktur.	
		Penilaian risiko		- UPR tingkat pemda dan tingkat OPD belum ditetapkan, sehingga kinerja penerapan MR yg digunakan sbg salah satu dasar penilaian kinerja pd seluruh unit tingkatan operasional unit kerja belum dpt dilakukan; - Risiko telah diidentifikasi dan dituangkan dlm RR, namun kualitas identifikasi risiko dan RR belum memadai.	
		Pemantauan		- Belum terdapat reviu atas proses kebijakan MR; - Reviu thd proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional OPD belum memadai	
27	Kota Salatiga	Penetapan tujuan		Belum seluruhnya merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan dalam dokumen perencanaan;	Walikota Salatiga agar: 1. Menginstruksikan OPD untuk memperbaiki dokumen perencanaan terkait dengan perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan;
		Kepemimpinan yg kondusif		- Belum memiliki kebijakan terkait manajemen risiko; - Personil Pengelola Risiko Strategis tingkat Pemda, Pengelola Risiko Strategis tingkat OPD dan Pengelola Risiko Operasional tingkat OPD belum ditetapkan;	2. Mempercepat penyelesaian penyusunan kebijakan MR;

		Penilaian risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Proses identifikasi dan analisis risiko belum mencakup setiap tingkatan risiko yaitu Risiko Strategis tingkat Pemda, Risiko Strategis tingkat OPD dan Risiko Operasional tingkat OPD; - Penerapan MR belum menjadi indikator kinerja pada seluruh dokumen perencanaan UPR tingkatan strategis unit kerja dan tingkatan operasional unit kerja; - Penerapan MR belum dilakukan terhadap semua kemitraan yang memiliki peran yang penting dalam organisasi; - Analisis dan mitigasi risiko korupsi belum disusun; 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan Personil Pengelola Risiko Strategis tingkat Pemda, Pengelola Risiko Strategis tingkat OPD dan Pengelola Risiko Operasional tingkat OPD; 4. Menginstruksikan penanggungjawab risiko agar melakukan proses identifikasi dan analisis Risiko Strategis tingkat Pemda, Risiko Strategis tingkat OPD dan Risiko Operasional tingkat OPD beserta rencana tindak
		Pencapaian tujuan	Masih terdapat temuan yang berulang terkait aset tetap, kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun 2016 sampai dengan 2020.	
28	Kota Semarang	Penetapan tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa OPD belum merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan; - Masih terdapat sasaran strategis pemda yg belum didukung oleh sasaran strategis OPD; - Masih terdapat sasaran strategis pemda dlm RPJMD yg bukan merupakan isu strategis di lingkungan pemda; - Kinerja di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup; - Target kinerja di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) 	Walikota Semarang agar : <ul style="list-style-type: none"> 1. Mendukung terselenggaranya SPIP Terintegrasi dgn penganggaran yg memadai; 2. Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait MR pd seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota UPR; 3. Mengintegrasikan SPIP Terintegrasi dalam proses bisnis pemda; 4. Membangun budaya risiko dan budaya antikorupsi. 5. Melakukan penilaian maturitas SPIP Terintegrasi secara memadai dgn menggunakan aplikasi e-sip setiap tahun. 6. Menginstruksikan kepada : <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah agar melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala OPD untuk merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan dalam Rencana Kinerja, memperbaiki indikator kinerja dan target kinerja yang belum berorientasi hasil, terukur, relevan, dan cukup; b. Sekretaris Daerah Kota Semarang agar : <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait MR pd seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota Unit Pemilik Risiko tingkat pemda dan tingkat OPD; 2) Menyusun RTP Strategis Pemerintah Kota Semarang atas seluruh sasaran strategis pemda; 3) Mengkoordinir seluruh Kepala OPD untuk menyusun RTP Strategis OPD atas seluruh sasaran strategis Kepala OPD dan menyusun RTP Operasional OPD atas seluruh kegiatan utama (non penunjang) OPD; 4) Menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD untuk mengkomunikasikan strategi dan kebijakan MR kpd seluruh pegawai; 5) Melakukan pemantauan secara
		Penegakan integritas dan nilai etika	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan antikorupsi telah diimplementasikan, tetapi belum menjangkau semua kegiatan utama organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan risiko korupsi belum ditetapkan secara permanen di dalam struktur organisasi; - Penetapan SOP antikorupsi belum mencakup tiga proses prinsip, yaitu cegah, deteksi, dan respons; - Kondisi integritas organisasional pada tataran sedang, yaitu kultur pengelolaan kegiatan, keuangan dan sumberdaya manusia pada beberapa kegiatan masih mengabaikan transparansi dan kepatuhan kepada peraturan dan/atau nilai prinsip yang melandasi terbitnya suatu peraturan; - Iklim etis prinsip di dalam lingkungan unit kerja pada tingkatan sedang, yaitu persepsi bersama bahwa peraturan dan hukum dianggap hal yang amat penting di dalam organisasi dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan pribadi atau organisasional telah tumbuh meskipun belum dominan; - Kejadian korupsi/perilaku koruptif yang ditemukan satu tahun terakhir ditindaklanjuti oleh orang/tim yang kompeten namun berpotensi memiliki konflik kepentingan; 	
		Kepemimpinan yg kondusif	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi sumber daya untuk penerapan MR pd tingkat operasional unit kerja belum memadai; - RTP belum dipertimbangkan dlm pengambilan keputusan baik di tingkat operasional maupun strategis; - Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait MR belum memadai - Kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan belum diterapkan dgn memadai. 	
		Penilaian risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Belum menyusun RTP Strategis Pemda dan RTP Strategis OPD; - RTP Operasional OPD telah disusun, namun masih kurang memadai; - Pemantauan atas RTP Strategis Pemda, RTP Strategis OPD, dan RTP Operasional OPD belum dilakukan; - Proses MR belum diintegrasikan dengan proses bisnis utama dan proses perencanaan. 	
		Informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan kepada perwakilan OPD, namun belum dikomunikasikan kepada seluruh pegawai; - RTP operasional belum dikomunikasikan ke pihak terkait. 	

		Pemantauan	- Belum dilaksanakan evaluasi secara berkala atas pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi; - Reviu dan evaluasi atas proses MR kurang memadai; - Pemantauan/monitoring terhadap risiko belum dilakukan.	5) Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap RTP Strategis pemda, RTP Strategis OPD, dan RTP Operasional OPD; c. Inspektur Kota Semarang agar : 1) Melakukan pendampingan kepada Tim Teknis SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Semarang dalam
		Pencapaian tujuan	- Beberapa capaian kinerja Tahun 2020 tidak tercapai, khususnya capaian kinerja sasaran strategis pemda; - Masih terdapat potensi aset bermasalah hukum.	
29	Kota Surakarta	Penetapan tujuan	- Belum merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan; - Masih terdapat sasaran strategis pemda yg belum didukung oleh sasaran strategis OPD; - Masih terdapat sasaran strategis pemda dlm RPJMD yg bukan merupakan isu strategis di lingkungan pemda; - OPD memilih program dan kegiatan selain urusan yang diampu; - Sasaran strategis di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup; - Target kinerja di beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome)	Walikota Surakarta agar : 1. Mendukung terselenggaranya SPIP Terintegrasi dgn penganggaran yg memadai; 2. Mengintegrasikan SPIP Terintegrasi dalam proses bisnis Pemkot Surakarta; 3. Membangun budaya risiko dan budaya antikorupsi di Pemkot Surakarta; 4. Melakukan penilaian maturitas SPIP Terintegrasi secara memadai dgn menggunakan aplikasi e-spip setiap tahun. 5. Menginstruksikan kpd : a) Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah agar melakukan koordinasi dgn seluruh Kepala OPD untuk: 1) Merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan dalam Rencana Kinerja, memperbaiki indikator kinerja dan target kinerja yang belum berorientasi hasil, terukur, relevan, dan cukup; 2) Menggunakan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dlm Kepmendagri No 050-3708 Thn 2020 sesuai dgn urusan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. b) Sekda agar : 1) Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait MR pd seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota UPR tingkat pemda dan tingkat OPD; 2) Menyusun RTP Strategis Pemda atas seluruh sasaran strategis Walikota; 3) Mengkoordinir seluruh Kepala OPD untuk menyusun RTP Strategis OPD atas seluruh sasaran strategis Kepala OPD dan menyusun RTP Operasional OPD atas seluruh kegiatan utama (non
		Penegakan integritas dan nilai etika	Kebijakan dan SOP terkait pengendalian gratifikasi, pungutan liar, whistle blowing system, dan benturan kepentingan baru sebatas terdiseminasi dan diterapkan secara parsial dan terbatas lingkungannya. Struktur yang dibentuk belum bekerja secara efektif sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan.	
		Kepemimpinan yg kondusif	- Alokasi sumber daya untuk penerapan MR pd tingkat operasional unit kerja belum memadai; - Kompetensi dan keterampilan dari pengelola risiko pada tingkat pemda dan OPD perlu ditingkatkan; - RTP belum dipertimbangkan dlm pengambilan keputusan di tingkat strategis pemda; - kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan belum diterapkan dgn memadai.	
		Penilaian risiko	- RTP Strategis Pemda, RTP Strategis OPD, dan RTP Operasional OPD telah disusun, namun masih kurang memadai; - Pemantauan atas RTP Strategis Pemda, RTP Strategis OPD, dan RTP Operasional OPD telah dilaksanakan, namun masih kurang memadai; - Proses MR belum diintegrasikan dengan proses bisnis utama dan proses perencanaan.	
		Informasi dan komunikasi	Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan kepada perwakilan OPD, namun belum dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.	
		Pemantauan	- Belum dilaksanakan evaluasi secara berkala atas pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi; - Reviu dan evaluasi atas proses MR kurang memadai; - Pemantauan/monitoring terhadap risiko belum dilakukan.	
		Pencapaian tujuan	- Beberapa capaian kinerja Tahun 2020 tidak tercapai, khususnya capaian kinerja sasaran strategis pemda; - Masih terdapat potensi aset bermasalah hukum.	
30	Kota Tegal	Penetapan tujuan	Dokumen perencanaan belum mencantumkan sasaran program dan sasaran kegiatan	Walikota Tegal agar: 1. Menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tegal; 2. Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan kebijakan tertulis atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, SOP,
		Lingkungan pengendalian	- Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yg mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, SOP, serta standar perilaku antarkorupsi belum ditetapkan; - Belum mengalokasikan sumber daya untuk penerapan MR; - Pegawai belum mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait MR; - Pegawai belum memiliki kesadaran terkait MR; - Identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko terkait kemitraan belum dilakukan	

Penilaian risiko	-	- Belum memiliki kebijakan MR dan menetapkan struktur pengelola risiko yg sesuai dgn Perdep No 4 Thn 2019; - Identifikasi dan analisis risiko strategis maupun operasional belum dilakukan sesuai Perdep No 4 Thn 2019.	dan standar perilaku antikorupsi; 3. Mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko termasuk untuk kegiatan sosialisasi, internalisasi, serta pelatihan pegawai; 4. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait kemitraan; 5. Menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang sesuai dengan Perdep 4 Thn 2019, termasuk menetapkan struktur pengelola risiko; 6. Melakukan Identifikasi dan analisis risiko baik risiko strategis maupun risiko
Kegiatan pengendalian	-	- Reviu kinerja blm dilakukan scr berkala dan terstruktur; - Proses penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja blm didokumentasikan dgn baik.	
Informasi dan komunikasi	-	- Strategi dan kebijakan MR belum didokumentasikan; - RR dan RTP belum dikomunikasikan ke pihak terkait.	
Pemantauan	-	- Evaluasi scr berkala atas pengendalian intern yg telah dilakukan dlm rangka mencapai tujuan organisasi belum dilakukan; - Proses MR belum direviu; - Pemantauan/monitoring thd risiko blm dilakukan	

TL
(7)
-
-
-
-
-
-
<p>1. Awal Tahun 2020, Inspektorat telah memfasilitasi kegiatan identifikasi, Analisa Risiko dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian RTP, namun baru beberapa OPD;</p> <p>2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes mengunggah seluruh produk hukum ke dalam JDIH;</p> <p>3. Pemerintah Kab Brebes telah berupaya terkait pengamanan aset dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, hasilnya adalah, LKPD Tahun 2019 memperoleh opini WTP.</p>
-
-
-

-
-
<p>1. Awal Tahun 2020, Inspektorat telah memfasilitasi kegiatan identifikasi, Analisa Risiko dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian RTP, namun baru beberapa OPD;</p> <p>2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes mengunggah seluruh produk hukum ke dalam JDIH;</p> <p>3. Pemerintah Kab Brebes telah berupaya terkait pengamanan aset dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, hasilnya adalah, LKPD Tahun 2019 memperoleh opini WTP.</p>
-
-
<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Peraturan tentang Standar Kompetensi Teknis dalam proses penyusunan - telah melakukan sensus BMD di lingkungan OPD Kota Tegal - Menyusun RTP yang dilengkapi dengan CEE, namun belum mengarah ke MR
-
-
Peraturan Bupati Jepara nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara

-
-

Pemerintah Kota Salatiga sudah menyusun dokumen Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sudah ada hasil fasilitasi dari Gubernur dan proses tindak lanjut. OPD sedang proses penyusunan dokumen Renstra 2023-2026.

--

Sudah dilaksanakan Workshop Penyusunan Kertas Kerja RTP bagi semua OPD

--

--

--

--

--

